



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Adelia Nafiatul Farida ^{a,1*}, Kevin Tumanggor ^{b,2}, Yasfa Ainun Abdullah ^{c,3}, Dewa Gede Arya W.Y ^{d,4}, M. Asif Nur Fauzi ^{e,5}

^{a,b,c,d} Telkom University, Fakultas Informatika, Surabaya, Indonesia

^e Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri. Fakultas Ekonomi Syariah, Pasuruan, Indonesia

¹ adelianf@student.telkomuniversity.ac.id; kevintumanggor@student.telkomuniversity.ac.id; yasfainun@student.telkomuniversity.ac.id; yudistira7@student.telkomuniversity.ac.id; asif.elek24@gmail.com
*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah
artikel:
Diterima : 25 Mei 2024
Revisi : 30 Mei 2024
Dipublikasikan : 30 Juni 2024
n

ABSTRAK

Perkembangan Sejarah Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai periode yang mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam mengadopsi dan mengembangkan sistem pemerintahan yang inklusif. Artikel ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengenalan konsep demokrasi pada abad ke-20 hingga masa kini. Berfokus pada periode 1945-1959 sebagai awal kemerdekaan, 1959-1965 dengan Demokrasi Terpimpin, Orde Baru (1966-1998), hingga era Reformasi (1998-sekarang), artikel ini menganalisis pergeseran politik, kekuasaan, dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan dan pemeliharaan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas dinamika politik, termasuk perdebatan konstitusional, krisis ekonomi, dan konflik politik yang mempengaruhi stabilitas demokrasi. Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk menggali lebih dalam dampak historis dan kontekstual dari setiap periode, serta meneliti perkembangan demokrasi saat ini dan tantangan masa depan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam memperkuat institusi demokratisnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan demokrasi di Indonesia, termasuk peran elit politik, partisipasi masyarakat, dan implementasi kebijakan publik.

Kata kunci:

Perkembangan Demokrasi
Indonesia
Sejarah
Periode

ABSTRACT

Keywords:
*Development of Democracy
Indonesia
History
Period*

The historical development of democracy in Indonesia has gone through various periods that reflect the country's long journey in adopting and developing an inclusive system of government. This article explains the development of democracy in Indonesia, starting from the introduction of the concept of democracy in the 20th century to the present. Focusing on the period 1945-1959 as the beginning of independence, 1959-1965 with Guided Democracy, the New Order (1966-1998), until the Reformation era (1998-now), this article analyzes shifts in politics, power, and the challenges faced in the formation and maintenance democracy. The research results show the complexity of political dynamics, including constitutional debates, economic crises, and political conflicts that affect democratic stability.

For future research, it is important to dig deeper into the historical and contextual impacts of each period, as well as exploring current democratic developments and future challenges that Indonesia may face in strengthening its democratic institutions. For further research, it is recommended to analyze more deeply the factors that influence the success or failure of democracy in Indonesia, including the role of political elites, community participation, and the implementation of public policies.

Copyright © 2024 (M. Asif Nur Fauzi). All Right Reserved

Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia telah menjadi subjek penelitian yang mendalam seiring dengan evolusi politik dan sosial negara ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga era Reformasi pada tahun 1998 dan seterusnya, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan (Fauzan Giyandri dkk., 2024), mempengaruhi dinamika kekuasaan, partisipasi publik, dan stabilitas institusi demokratisnya. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali inti pokok permasalahan yang mendasari perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan memfokuskan pada periode kritis dalam sejarah politik Indonesia, termasuk periode 1945-1959 yang dikenal dengan sebutan Demokrasi Palementer, periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), masa Orde Baru (1966-1998), dan era Reformasi (1998-sekarang) (Nurcholish Madjid, t.t, 2022), penelitian ini akan menyelidiki tantangan, dinamika, dan perubahan yang memengaruhi proses pembentukan dan pemeliharaan demokrasi di Indonesia.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas demokrasi Indonesia dan implikasinya untuk masa depannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman kita tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan memberikan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat fondasi demokratis negara ini

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menyelidiki perkembangan demokrasi di Indonesia dari periode awal kemerdekaan hingga saat ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail dan menganalisis peristiwa-peristiwa historis serta dinamika politik yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Data primer dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, termasuk dokumen-dokumen sejarah, perundang-undangan, dan pidato politik yang relevan dengan setiap periode yang diteliti. Data sekunder juga digunakan dari literatur ilmiah, jurnal, dan publikasi akademis tentang sejarah politik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap pola perkembangan demokrasi di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi stabilitasnya sepanjang sejarah, memberikan wawasan penting untuk memperkuat fondasi demokratis negara ini di masa depan

Pembahasan

Pengertian Demokrasi

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dengan bentuk pemerintahan Demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demokratia” yang berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), jika diartikan secara luas Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana rakyatnya dapat memegang penuh kekuasaan politik. Pada masa penjajahan dahulu rakyat pribumi belum mengenal demokrasi dikarenakan kekuasaan Indonesia pada masa itu masih dikuasai oleh Belanda, hal ini pula membuat warga pribumi belum mampu menyuarakan pendapat mereka mengenai Demokrasi. Pada abad ke – 20 baru mulailah masyarakat Indonesia mengenal Demokrasi, tokoh yang mendasari Demokrasi politik pada masa itu adalah Budi Utomo pada masa ini lah masyarakat benar – benar bebas dalam menyuarakan pendapat mereka. Sebelum itu pada masa Demokrasi kuno dalam pemerintahan sudah di terapkan, hanya saja Demokrasi ini hanya dapat dijalankan dan dilaksanakan bagi kaum elit dan berpengaruh saja.

Jenis – Jenis Demokrasi

Dalam bentuk pemerintahan sendiri demokrasi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi modern, demokrasi tersebut merupakan jenis demokrasi melalui aspirasi rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi ideologi, dimana demokrasi ini merupakan jenis demokrasi berdasarkan suatu pandangan atau ideologis tersebut.

Dari pengertian diatas dapat dijabarkan jenis – jenis demokrasi sebagai berikut :

1. Demokrasi aspirasi rakyat

- a.) Demokrasi Langsung Dimana sistem demokrasi yang warga negaranya diberikan kesempatan secara langsung untuk menentukan kebijakan umum dan undang – undang.
- b.) Demokrasi Tidak Langsung Dimana sistem demokrasi yang digunakan menggunakan sistem perwakilan.

2. Demokrasi Prinsip Ideologi

- a.) Demokrasi Liberal Dimana demokrasiya menganggap kebebasan individu sangat penting.
- b.) Demokrasi Rakyat Dimana sistem demokrasiya lebih mengutamakan kepentingan negara serta lebih merujuk kepada paham sosialisme dan komunisme.
- c.) Demokrasi Pancasila Dimana sistem demokrasiya menganut paham bahwa lebih mementingkan kepentingan masyarakat dengan diadakannya musyawarah mufakat.

Periode Demokrasi Indonesia

Indonesia sendiri demokrasi terbagi menjadi beberapa macam demokrasi berdasarkan rentang waktu. Indonesia telah mengalami perubahan politik yang signifikan sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Dari tahun 1945 hingga 1959, terbentuklah demokrasi liberal, diikuti oleh era Demokrasi Terpimpin dari 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Era Orde Baru, dipimpin oleh Presiden Soeharto dari 1966 hingga 1998, memperkenalkan Demokrasi Pancasila namun menghadapi kritik atas praktik tidak demokratis. Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, membawa perubahan signifikan, termasuk amandemen konstitusi dan desentralisasi. Saat ini, Indonesia terus menerapkan demokrasi, yang ditandai dengan pemilihan umum yang teratur, kebebasan pers, partisipasi masyarakat sipil, dan desentralisasi.

A. Awal Kemerdekaan (1945 - 1959)

Pada periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi liberal atau Demokrasi Parlementer dimana periode ini adalah cikal bakal terbentuknya demokrasi di Indonesia. Dalam periode ini berkiblat kepada peraturan yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang berisikan antara lain pembentukan negara, kedaulatan rakyat, system pemerintahan, hak asasi manusia, pembatasan kebebasan, pembentukan badan – badan pemerintahan, amandemen dan perubahan. Pada periode ini juga terjadilah masa republic Indonesia serikat (RIS) yang di pimpin oleh Ir. Soekarno dan presiden RI As Aad, kemudian konstitusi republik Indonesia serikat digantikan oleh UUD 1950 pada tanggal 17 agustus 1950.

B. Demokrasi Parlementer (1959 - 1966)

Periode ini dimulai setelah proklamasi dimana dalam periode ini telah muncullah konsep demokrasi terpimpin, yang diambil dari nilai dan karakteristik yang ada di Indonesia.pada periode ini terjadi beberapa kegagalan dalam menetapkan undang – undang. Sebelumnya saat menyuarakan demokrasi ini telah di tentang oleh kelompok oposisi, menurut mereka pengertian terpimpin sangat bertentangan dengan periode ini yang dimaksud adalah demokrasi memiliki arti kebebasan hal ini sangat berlawanan dengan kata terpimpin yang merujuk pada ke pada dictatorial demokrasi.

C. Orde Baru (1966 - 1998)

Periode ini dipimpin oleh Soeharto setelah adanya kejadian pemberontakan G30S/PKI yang menyebabkan jatuhnya masa jabatan Ir Soekarno, tetapi Soeharto masih menjalankan tugas dari presiden Ir Soekarno untuk menghentikan pemeberontakan dari kejadian G30S/PKI. Setelah menjalankan perintah tersebut Soeharto yang membuat MPR mengangkatnya menjadi presiden republik Indonesia pada saat itu, setelah naik jabatan presiden Soeharto menerapkan periode orde baru. Awalnya orde baru hanya mengutamakan pluralisme yang bersifat pluralistic sebagai perlawanan untuk pemerintahan yang otoriter, sehingga ditetapkan Demokrasi Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia.

D. Reformasi (1998 – Sekarang)

Setelah runtuhnya periode orde baru membawa perubahan yang sangat jauh dari periode – periode sebelumnya, terjadi demo besar – besaran oleh mahasiswa dan aktivis 1998 yang membuat periode ini dikeal dengan sebutan periode reformasi. Perubahan periode ini membuat rakyat Indonesia menjadi trauma tentang apa yang akan terjadi, dikarenakan masa otoriter pernah terjadi pada periode orde lama dan orde baru. Pada masa ini juga terlahirlah Gerakan Reformasi yang bertujuan untuk menjadi jawaban atas terjadinya krisis kehidupan, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kepercayaan.

Penerapan Demokrasi Di Indonesia Pada Saat Ini

Penerapan demokrasi di Indonesia saat ini merupakan cerminan dari perjalanan panjang dan kompleks sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Meskipun demokrasi telah menjadi prinsip dasar namun implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang hadir dalam proses menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satu contoh dari penerapan demokrasi di Indonesia yang masih berjalan hingga saat ini adalah proses pemilihan umum yang berlangsung secara berkala (Harimurti, 2022). Pemilihan umum presiden, anggota parlemen, dan pemerintah daerah dilakukan secara teratur dengan partisipasi yang relatif tinggi dari masyarakat. Contoh lainnya adalah kebebasan pers dalam menyuarakan pendapat mereka.

Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintah serta mengkritik dan mendorong akuntabilitas mereka. Kekuasaan juga telah didesentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tiap daerah memiliki hak otonomi mereka masing-masing. Namun selain hal-hal positif di atas, juga masih ada beberapa hal negatif dan tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi salah satu halangan terbesar dalam demokrasi di Indonesia. Hal ini terjadi secara masif di semua kalangan masyarakat baik dari pemerintahan hingga masyarakat umum. Selain itu, lemahnya penegakan hukum merupakan tantangan serius dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau orang-orang yang berpengaruh lainnya yang tidak ditindak dengan tegas dan adil. Hal ini menciptakan masyarakat yang tidak percaya pada hukum.

Pentingnya Demokrasi Dalam Berwarga Negara

Demokrasi sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana sistem ini kekuatan politiknya dipegang atau ditentukan oleh rakyat. Entah itu dilakukan secara langsung ataupun diwakilkan oleh perwakilan rakyat yang dimana sudah dipilih secara sah oleh masyarakat sendiri untuk mewakili suara mereka. Demokrasi sendiri juga sudah ada dan dipilih sebagai sistem pemerintahan yang resmi dalam Indonesia. Namun kapan dan bagaimana Demokrasi bisa menjadi pilihan kita sebagai alat pemerintahan yang sah dan resmi? Semua ini bermula saat setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 yang kemudian dicetuskan oleh Presiden Soekarno atau kerap dikenal dengan sapaan Bung Karno sebelum beliau menjadi presiden pertama Indonesia agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

Kemudian berikut beberapa tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya sistem demokrasi sebagai dasar mengapa demokrasi begitu penting ditegakkan dalam sistem pemerintahan maupun dalam warga negara :

Jenis-Jenis Tindakan yang menyebabkan rusaknya sistem demokrasi

1. Masih sering terlihat terjadinya money politic atau “politik uang”

Perlu kita ketahui money politic atau politik uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada sistem politik yang dimana melibatkan penggunaan uang atau sumber daya finansial lainnya untuk mempengaruhi proses politik, terutama dalam pemilihan umum. Atau sederhananya tindakan yang mengakitkan hubungannya antara politik dengan uang untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia politik, yang dimana tentu dapat merusak sistem pemerintahan dalam negeri.

2. Politik Hitam

Kemudian adanya Politik hitam yang dimana suatu istilah yang merujuk pada praktikpraktik politik yang tidak etis, gelap, atau ilegal serta biasanya melibatkan tindakan manipulatif, korupsi, dan upaya untuk merugikan lawan politik yang dimana intinya juga menjadi suatu tindakan yang dilakukan sebagian besar orang dalam pemerintahan untuk mengungguli suara agar terpilih dalam suatu parlemen atau jabatan yang mereka inginkan

3. Intimidasi

Dan yang terakhir adanya sikap intimidasi pada pemerintahan demokrasi yang dimana tindakan ini melibatkan ancaman, tekanan, atau tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik . Biasanya dapat berupa tindakan pelanggaran hak-hak , dampak pada kebebasan sipil dan ancaman terhadap demokrasi .

Kemudian pada sistem pemerintahan ini terdapat beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang dimana bentuk prinsip nya mencakup berbagai jenis yang contohnya seperti , Pemilihan umum , Sistem Demokrasi , Perkembangan Terbaru , prinsip pancasila serta . Yang dimana dari keempat hal ini berikut beberapa penjelasan singkatnya :

Contoh Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Pemilihan umum

Dimana dengan adanya demokrasi dalam berwarga negara , masyarakat dapat terlibat secara langsung serta dapat memahami secara luar dan dalam bagaimana sistem demokrasi dalam negeri kita bekerja , sebagai mana contoh pemilihan umum . Tindakan ini merupakan suatu tindakan demokrasi langsung yang dimana masyarakat terlibat langsung pada tindakan demokrasi , berbeda 180 derajat dengan yang diwakilkan oleh DPR yang sudah dipilih yang dimana dipercaya sebagai yang mewakilkan suara masyarakat.

2. Sistem Demokrasi

Dalam sistem demokrasi adanya sistem demokrasi yang dimana semua warga negara serta pemimpin negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan . Dan Demokrasi ini dapat dilakukan secara langsung seperti pemilihan umum pada point A dan tidak langsung atau diwakilkan.

3. Prinsip pancasila

Terakhir adanya prinsip pancasil tau demokrasi pancasila , yang dimana suatu sistem demokrasi yang saat ini digunakan atau dianut oleh kita saat ini . Yang dimana dianggap sudah sesuai oleh keberibadiaan bangsa. Dengan kata lain kesimpulan dari pentingnya berdemokrasi dalam berwarga negara ialah , demokrasi memang merupakan

suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang dimana menjadi pondasi dasar masyarakat Indonesia dalam mengatur bangsa dan negara secara sah serta adil. Namun bila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memahami dasar akan pemahaman demokrasi itu sendiri maka dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dalam sistem pemerintahan yang akan digunakan oleh sebagian pejabat dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu perlunya keterlibatan dan pemahaman akan demokrasi sungguh perlu agar meminimalisir tindakan dan oknum yang menyalahgunakan sistem demokrasi dalam negeri.

Referensi

- WARDAH, M. (2022). URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID (Studi Kasus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Giyandri, T. F., & Sinaga, J. B. B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 371-378.
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., & Maulina, R. (t.t.). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil.
- Fauzan Giyandri, T., Bungaran, J., & Sinaga, B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *JIHHP*, 4(3).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>
- Kuliah, M., Demokrasi Dosen Pengampuh, P., & Bungana Perangin-angin, R. (2016). SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA.
- Nurcholish Madjid, M. (t.t.). URGENSI INDEPENDENSI SERIKAT BURUH SEBAGAI PENOPANG DEMOKRASI PERSPEKTIF MASYARAKAT.